

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEMONSTRAN
DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT TERHADAP
KEKERASAN KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Magister Hukum



OLEH :

MOH NURUL JADID
NIM : 1322100003

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEMONSTRAN
DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT TERHADAP
KEKERASAN KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh

MOH NURUL JADID

Nim 1322100003

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEMONSTRAN
DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT TERHADAP
KEKERASAN KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

Diajukan Oleh :

MOH NURUL JADID
Nim 1322100003

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan

Surabaya, 25 Januari 2023

Dr. Tomy Michael S.H., M.H.
Pembimbing



TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEMONSTRAN
DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT TERHADAP
KEKERASAN KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA

Diajukan Oleh :

MOH NURUL JADID

Nim 1322100003

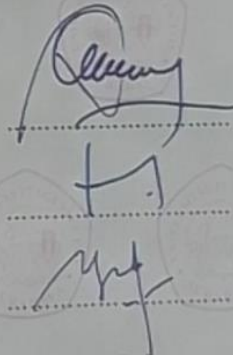
Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 7 Juli 2023
Tim Penguji :

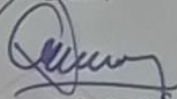
Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
Sekretaris

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.
Anggota



Mengesahkan,
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : MOH. NURUL JADID
Nim : 1322100003
Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEMONSTRAN DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT TERHADAP KEKERASAN KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 Januari 2023
Hormat saya



MOH. NURUL JADID

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan lancar. Tesis ini sebagai persyaratan untuk mencapai gelar magister hukum starta dua di fakultas hukum , program studi magister hukum, universitas 17 agustus 1945 surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut di tulis tesis yang berjudul, : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEMONSTRAN DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT TERHADAP KEKERASAN KEPOLISIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** .

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi demonstran dari tindakan kekerasan oleh kepolisian PERSPEKTIF hukum pidana, dan di digunakan sebaik mungkin untuk kajian bagi akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, ada banyak orang yang berkontribusi untuk terselesaikannya tesis ini. Pada bagian ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pribadi-pribadi berikut :

1. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan bantuan
2. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. , selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho , MM, CMA, CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono , S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh bapak dan ibu Dosen serta Staff Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Drs. H.M . Muhajir Dan Dra. Hj. St. Hawa kedua orang tua saya yang selalu membantu, memotivasi, serta mendoakan saya tiada henti . terimakasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang sudah di berikan untuk saya menempuh pendidikan hukum.

7. Ahmad Shohibul Fadilah, S.S., Siti Nur lailatul Marhamah Agustin, S.Hum. dan M. Lailu Muharrom Fajrul Anam saudara saudari saya yang selalu memberikan semangat, inspirasi dan senantiasa mendoakan saya.
8. Teman-teman Program Studi Magister Hukum Angkatan 46, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terimakasih untuk kebersamaan dan semangat nya selama menempuh pendidikan.

Akhir kata ,menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan guna perbaikan di masa yang mendatang.

Surabaya, 25 Januari 2023

MOH. NURUL JADID, S.H.

Abstract

freedom of expression in public is the right of Indonesian citizens in accordance with the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution Article 28 E "everyone has the right to freedom of association, assembly and expression of opinion". One of the efforts to convey this opinion is by holding demonstrations, freedom of expression is regulated in Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expressing opinions in public. In demonstration activities, there is often violence perpetrated by activity guards which results in injury. In this study there are two formulations of the problem, namely 1. How is legal protection for demonstrators from police violence reviewed by criminal law 2. How is law enforcement for perpetrators of violence against demonstrators reviewed by criminal law. The normative research method is the research method used. This study aims to analyze the legal protection for demonstrators from police violence in criminal law reviews, and in relation to law enforcement for perpetrators of violence against demonstrators in criminal law reviews. The results of this study are 1. Law No. 9 of 1998 concerning Independence Expressing opinions in public and Article 170 Kuhp is a guarantee of legal protection for demonstrators in the perspective of criminal law. 2. For the sake of achieving justice and legal certainty, police perpetrators of violence must be subject to legal proceedings in accordance with statutory regulations and be aggravated because their position is in accordance with Article 52 of the Criminal Code. This research is also expected to help to provide an understanding of the rights and obligations possessed by demonstrators. The functions and powers possessed by the police in handling demonstration activities.

Keywords: demonstration, violence, and police.

Abstrak

kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara Indonesia sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Salah satu upaya penyampaian pendapat tersebut dengan melakukan demonstrasi, kebebasan menyampaikan pendapat di atur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam kegiatan demonstrasi kerap kali terjadi kekerasan yang di lakukan oleh pengaman kegiatan yang menimbulkan cedera. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi demonstran dalam menyampaikan pendapat terhadap kekerasan kepolisi perspektif hukum pidana 2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap demonstran dalam kebebasan menyampaikan pendapat PERSPEKTIF hukum pidana. Metode penelitian normative merupakan metode penelitian yang di gunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi demonstran dari kekerasan kepolisian dalam tinjauan hukum pidana, dan terkait penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap demonstran dalam tinjauan hukum pidana. hasil dari penelitian ini yaitu 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum dan Pasal 170 Khp merupakan Jaminan perlindungan hukum terhadap demonstran dalam perspektif hukum pidanan. 2. Demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum polisi pelaku kekerasan wajib di proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan di perberat karena jabatannya sesuai dengan Pasal 52 Kuhp. Penelitian ini juga di harapkan dapat membantu untuk memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban yang di miliki oleh demonstran. Fungsi dan kewenang yang di miliki oleh kepolisian dalam melakukan penanganan kegiatan demonstrasi.

Kata kunci : demonstrasi, kekerasan, dan polisi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan Tim Penguji Dan Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis	v
Kata Pengantar	vi
Abstract	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Orisinalitas	9
1.6. Metode penelitian	18
a. Jenis Penelitian	18
b. Pendekatan Masalah	18
c. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	19
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	21
f. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
1.7. Sistematika Penulisan	23
BAB II	
LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	24

2.1. Landasan Teori	24
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum.....	24
2.1.2. Teori Hukum Pancasila.....	28
2.1.3. Teori Keadilan Hukum.....	41
2.1.4. Teori Kepastian hukum.....	61
2.2. Penjelasan Konsep	63
2.2.1. Konsep Kebebasan Menyampaikan Pendapat.....	63
2.2.2. Konsep Kekerasan	69
2.2.3. Konsep demonstran	73
2.2.4. Konsep Polisi	74
BAB III	
PEMBAHASAN	85
3.1. Perlindungan hukum bagi demonstran dari kekerasan kepolisian	85
3.1.1. Kekerasan kepolisi terhadap demonstran Perspektif hukum pidana....	85
3.1.2. Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Demonstran Menurut Hukum Pidana	90
3.1.3. Hak dan kewajiban demonstran.....	95
3.1.4. Perlindungan hukum bagi demonstran	99
3.2. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Demonstran ...	102
3.2.1. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kekerasan terhadap demonstran	102
3.2.2. Penyelidikan	104
3.2.3. Penyidikan	106
3.2.4. Penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap demonstran	109
BAB IV	
PENUTUP.....	127
4.1. KESIMPULAN	127
4.2. SARAN.....	128
DAFTAR BACAAN	